



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/7610/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (JABATAN)
KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA AMZAL, SKM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Negara yang berlokasi di jalan Tunas Indah Kelurahan Bukit Datu, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai Provinsi Riau, telah ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan I (Jabatan) sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/II/308/2017 tanggal 3 November 2017;
- b. bahwa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan izin penghunian kepada Amzal, SKM, dan dalam rangka tertib administrasi perlu diterbitkan keputusan mengenai penunjukan penghuniannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Amzal, SKM;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang

- Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 156);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/III/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pemberian Izin Penghunian (PIP) dan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kesehatan;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/II/308/2017 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA AMZAL, SKM.

- KESATU : Menunjuk Rumah Negara : Jalan Tunas Indah
Kelurahan Bukit Datu.
Kecamatan Dumai Barat,
Kota Dumai Provinsi Riau
- Golongan dan Kelas/Tipe : I (Jabatan) / 70 m²
- Untuk Ditempati : Amzal, SKM
- Jabatan : Kepala Sub Bagian
Administrasi Umum Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas
III Dumai
- Pangkat/Gaji Pokok : Penata Tk. I, III/d,
Rp4.370.900,00
- Terhitung mulai : 1 Maret 2022
- Uang sewa perbulan : Rp442.970,00
- KEDUA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terhitung mulai rumah tersebut di tempati oleh yang
bersangkutan yaitu sejak tanggal 12 Agustus 2022, dengan
memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh
Bendahara Gaji dan harus disetor langsung ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1
(satu) bukti setor kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN.
- KETIGA : Penghuni wajib melaksanakan Ketentuan Penghunian Rumah
Negara Golongan I (Jabatan) yang telah ditandatangani di atas
materai dan diketahui oleh Pimpinan Satuan Kerja yang
menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA tidak ditaati oleh penghuni, maka izin penghunian
yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat
yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan
kepada yang bersangkutan.

- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Dumai
5. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai
6. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
7. Kepala Biro Umum
8. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
9. Bendahara/pembuat Daftar gaji Biro Umum

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003